

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan dalam masyarakat dari kondisi sekarang menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.² Tiga tujuan utama dari pembangunan ini yakni meningkatkan kesempatan dan mewujudkan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperluas pilihan individu dalam aspek ekonomi dan sosial.³ Dengan tercapainya ketiga tujuan tersebut, pembangunan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing.

Salah satu indikator utama yang sering dimanfaatkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat menghadapi kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan muncul sebagai akibat dari tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ukuran kemiskinan bukan hanya dilihat dari jumlah orang miskin, tetapi juga dari persentasenya dalam keseluruhan penduduk di suatu wilayah. Persentase ini menunjukkan seberapa besar bagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁴

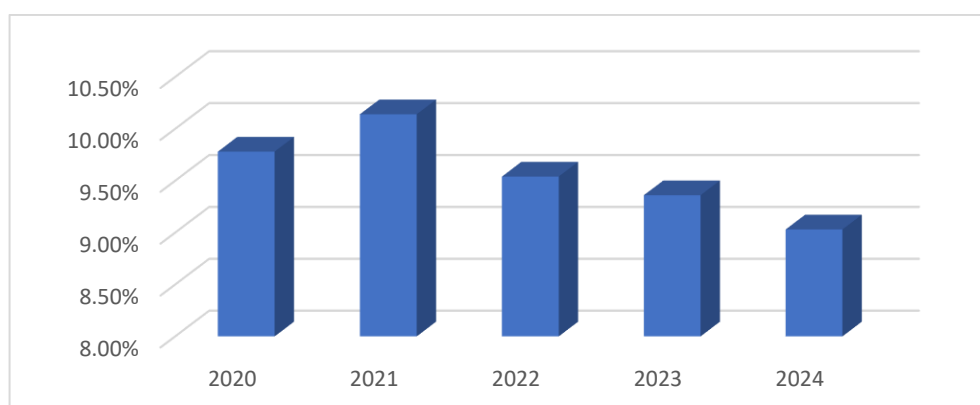
² Bonaraja Purba, *et. al.*, *Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2

³ A. Jajang W. Mahri, *et. al.*, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), 8

⁴ Arfa Valiant Kevin, Ardito Bhinadi, dan Akhmad Syari'udin, "Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi

Kemiskinan tidak hanya berdampak negatif terhadap sektor ekonomi, melainkan juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti halnya dapat meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat, terganggunya kondisi kesehatan manusia serta rendahnya tingkat pendidikan anak-anak.⁵ Oleh karena beberapa dampak tersebut, upaya penanggulangan masalah kemiskinan sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak negatif kemiskinan pada sektor ekonomi dan non-ekonomi yang mana dampak negatif tersebut berpotensi akan menghambat pembangunan manusia secara menyeluruh.

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan pergerakan menurun meskipun sempat terdampak pandemi. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,78% dan meningkat menjadi 10,14% pada 2021 akibat tekanan ekonomi yang meluas. Memasuki

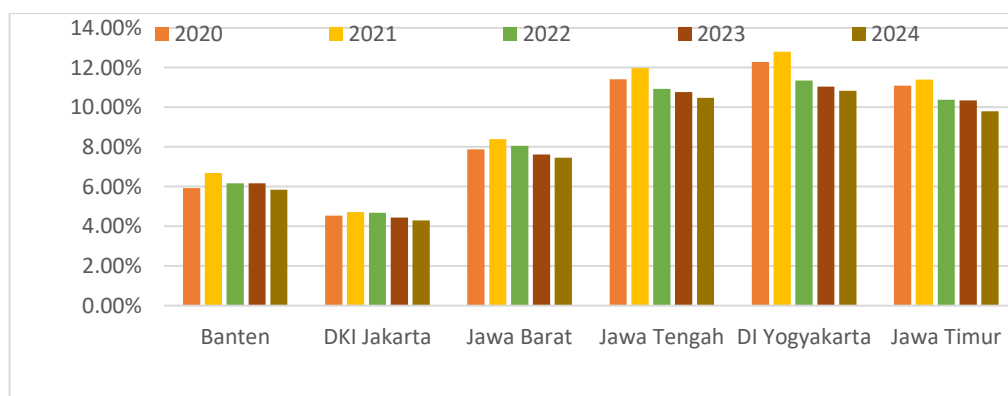
Jawa Tengah Tahun 2013-2021”, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1*, no. 12 (November 2022): 2959-2968.

⁵ Audi Rahmatika, *et. al.*, “Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pangan” *JTEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen 2*, no. 12 (Desember 2024): 131-144.

tahun 2022, angka tersebut mulai menurun menjadi 9,54% kemudian kembali turun menjadi 9,36% pada 2023. Penurunan berlanjut secara signifikan pada 2024 dengan capaian 9,03%.⁶ Kondisi penurunan ini yang menunjukkan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi serta efektivitas kebijakan sosial dan fiskal pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan.

Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, persebaran tingkat kemiskinan antar daerah masih belum merata. Beberapa provinsi tetap berada pada level kemiskinan yang relatif tinggi, termasuk Jawa Tengah. Selama periode tersebut, Provinsi Jawa Tengah terus-menerus menempati posisi kedua dengan persentase penduduk miskin paling tinggi di Pulau Jawa, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut persentase penduduk miskin yang berada di Pulau Jawa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2020-2024

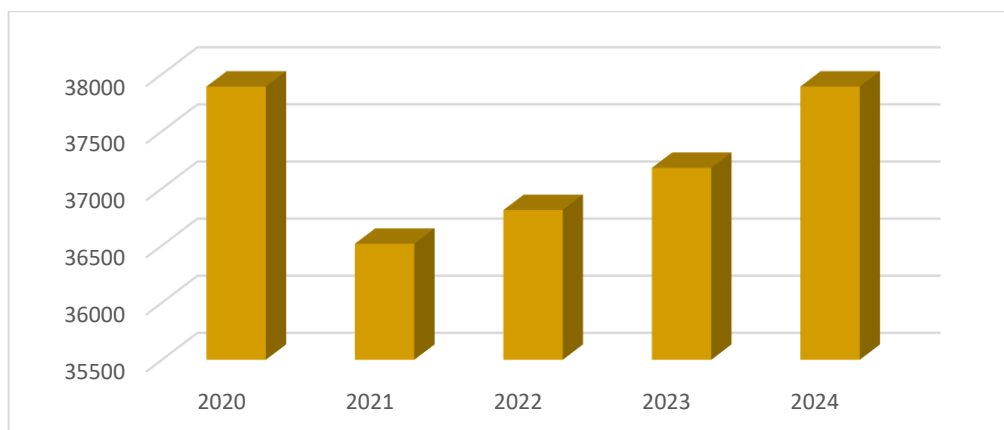


Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

⁶ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen” 15 Januari 2025, diakses Oktober 10, 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-pendudukmiskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 11,41% dan meningkat menjadi 11,97% pada 2021 akibat tekanan ekonomi berkepanjangan dari pandemi *COVID-19*. Kemudian, mulai tahun 2022 tingkat kemiskinan berangsur menurun menjadi 10,93%, kemudian 10,77% pada 2023, dan mencapai 10,47% pada 2024. Meskipun penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi, capaian persentase kemiskinan tersebut masih lebih tinggi daripada persentase kemiskinan provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (7,46%) dan DKI Jakarta (4,30%), serta tetap berada di atas Jawa Timur yang mencatat persentase 9,79%. Meskipun mencerminkan perbaikan, angka kemiskinan yang masih berada di atas 10% selama lima tahun berturut-turut menjadi semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, yang mana dari 36,52 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 37,89 juta jiwa pada tahun 2024.

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut di tengah tingkat kemiskinan yang masih di atas 10% berpotensi memperburuk beban sosial dan

ekonomi daerah. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung menambah tekanan terhadap sumber daya yang tersedia, meliputi lahan, fasilitas pendidikan, akses kesehatan, dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan akses terhadap layanan dasar yang termasuk ke dalam indikator utama kesejahteraan.⁷ Dengan demikian, tingginya tingkat kemiskinan yang berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat mencerminkan tantangan serius dalam upaya pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji secara luas dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang memiliki keterkaitan erat terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa kondisi seperti minimnya ketersediaan modal, keterbelakangan dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.⁸

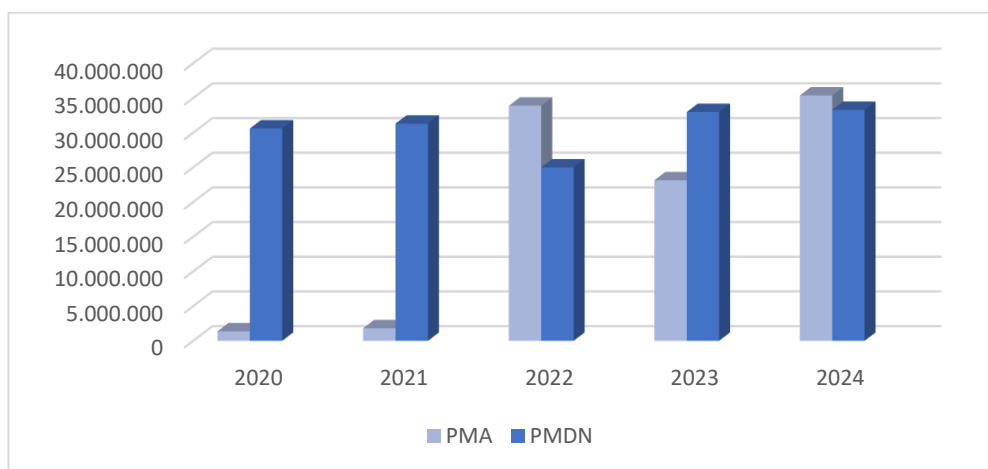
Salah satu faktor penyebab kemiskinan menurut teori lingkaran kemiskinan adalah minimnya ketersediaan modal. Akumulasi dari modal sendiri terbentuk dari besaran tabungan yang diinvestasikan dengan tujuan

⁷ Pertama Yul Asmara Pane, Wawan Patriansyah, dan Elfi Syahri Ramadhona, “Analisis Relevansi Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Pendapatan Sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Angkola Barat” *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 3 (September 2025): 48-54.

⁸ Sutiyo dan Hasna Azmi Fadhillah, *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: Deepublish, 2024), 24

untuk memperbesar output di kemudian hari.⁹ Ridwan dan Nawir menyatakan bahwa peningkatan nilai investasi memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah melalui perluasan kegiatan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Investasi yang tumbuh akan mendorong terbentuknya lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan berusaha, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran.¹⁰ Peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat. Fluktuasi nilai investasi Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025

Diagram tersebut menunjukkan bahwa tahun 2020, nilai investasi asing langsung (Penanaman Modal Asing atau PMA) tercatat sebesar Rp1.363.635.000.000 (Rp1,36 triliun) dan meningkat menjadi

⁹ Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: Kimfa Mandiri, 2019), 51

¹⁰ Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir, *Buku Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 47

Rp1.820.243.000.000 (Rp1,82 triliun) pada tahun 2021, yang menandakan mulai tumbuhnya minat investor asing di masa awal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022, ketika nilai PMA melonjak tajam menjadi Rp33.895.259.000.000 (Rp33,90 triliun), mencerminkan masuknya investasi asing berskala besar. Pada tahun 2023, nilai PMA menurun menjadi Rp23.142.197.000.000 (Rp23,14 triliun) dan pada tahun 2024, nilai PMA kembali naik menjadi Rp35.370.553.000.000 (Rp35,37 triliun).

Sementara itu, nilai investasi domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN) pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp30.606.131.000.000 (Rp30,61 triliun), meningkat menjadi Rp31.311.180.000.000 (Rp31,31 triliun) pada tahun 2021, akan tetapi sempat terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp24.992.291.000.000 (Rp24,99 triliun) sebelum kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp32.987.199.000.000 (Rp32,99 triliun). Pada tahun 2024, baik PMA maupun PMDN menunjukkan kinerja positif dengan nilai masing-masing sebesar Rp35.370.553.000.000 (Rp35,37 triliun) dan Rp33.298.703.000.000 (Rp33,30 triliun).

Meskipun secara peningkatan investasi mampu menurunkan kemiskinan, apabila dilihat dari total investasi (akumulasi PMA dan PMDN) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2024, hubungan pengaruh tersebut belum menunjukkan pola yang konsisten. Total investasi yang meningkat dari Rp31,97 triliun pada 2020 menjadi Rp33,13 triliun pada 2021 menghasilkan tingkat kemiskinan yang justru naik dari 11,41% menjadi 11,97%. Pada tahun

2022, total investasi melonjak signifikan menjadi sekitar Rp58,89 triliun, tetapi penurunan kemiskinan yang terjadi relatif kecil menjadi 10,93%. Selanjutnya, pada 2023 total investasi menurun menjadi sekitar Rp56,13 triliun, namun kemiskinan tetap mengalami penurunan menjadi 10,77%. Pada 2024 ketika total investasi kembali meningkat menjadi sekitar Rp68,67 triliun, kemiskinan hanya turun tipis menjadi 10,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan total investasi di Provinsi Jawa Tengah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang sebanding.

Selain faktor investasi, keterbelakangan turut menjadi faktor penyebab kemiskinan suatu daerah. Menurut Goulet dalam Bryant dan White, kondisi keterbelakangan umumnya ditandai oleh rasa tidak berdaya, baik pada tingkat individu maupun kelompok.¹¹ Keadaan ini mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya membatasi kemampuan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

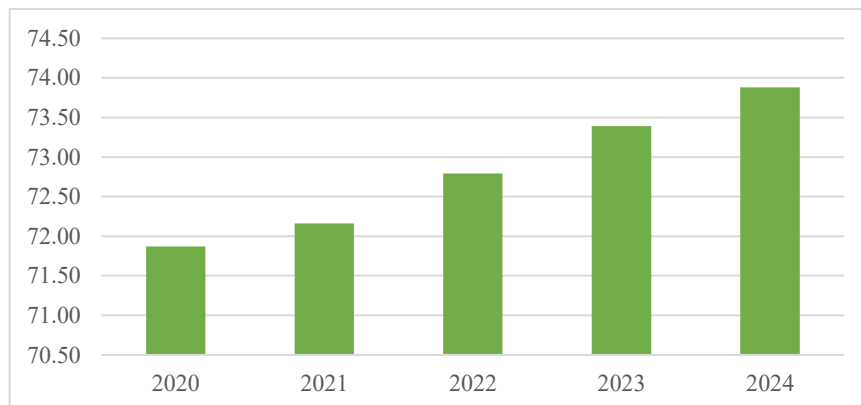
Penelitian oleh Angelia dan Anitasari menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan secara kuat dengan tingkat produktivitas. Kualitas hidup masyarakat yang meningkat dicerminkan dengan perbaikan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan penghasilan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menurunkan tingkat kemiskinan.¹²

Fluktuasi angka IPM di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh tabel berikut:

¹¹ Saiful Deni, *et. al.*, *Konflik & Pembangunan Politik Kepulauan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 151

¹² Firly Angelia dan Merri Anitasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2022" *RANAH RESEARCH: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (Mei 2025): 2796-2806.

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IPM berada di angka 71,87% dan terus naik menjadi 72,16% di tahun 2021, lalu meningkat lagi menjadi 72,79% di tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 73,39%, hingga mencapai 73,88% di tahun 2024.

Meskipun di Provinsi Jawa Tengah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang 2020–2024, dinamika kemiskinan tidak bergerak searah dengan perkembangan tersebut. Pada 2021, ketika IPM naik dari 71,87 menjadi 72,16, tingkat kemiskinan justru meningkat dari 11,41% menjadi 11,97%. Angka ini mengisyaratkan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia belum mampu mengimbangi tekanan ekonomi akibat pandemi. Pada periode 2022–2024, kemiskinan memang menurun kembali hingga mencapai 10,47%, tetapi laju penurunannya jauh lebih lambat dibandingkan peningkatan IPM. Ketidaksepadanan ini menunjukkan bahwa

meskipun kualitas manusia yang meningkat belum secara penuh berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, sehingga efektivitas IPM dalam menurunkan kemiskinan masih terbatas dan dipengaruhi oleh faktor struktural lainnya.

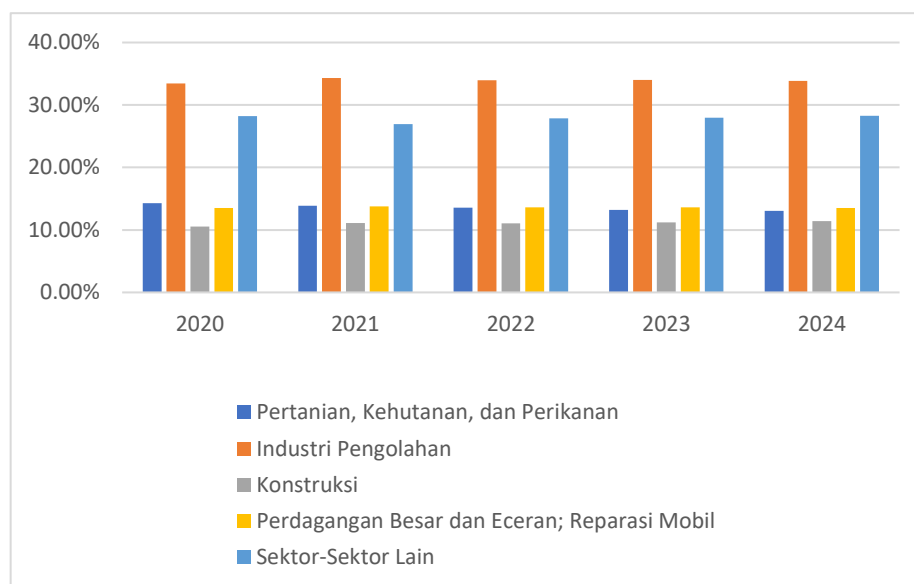
Selain kedua faktor di atas, ketidaksempurnaan pasar menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yang kemudian berdampak bagi kemiskinan. Dalam teori tradisional tentang ketidaksempurnaan atau kegagalan pasar, kondisi ini digambarkan sebagai situasi ketika mekanisme pasar tidak mampu mencapai alokasi sumber daya yang efisien, sehingga menimbulkan kehilangan efisiensi atau kerugian sosial. Akibatnya, hasil yang dihasilkan pasar menjadi tidak optimal dan sering kali menimbulkan eksternalitas maupun keberadaan barang publik. Salah satu bentuk pasar tidak efisien menurut Stiglitz adalah *product mix inefficiency*, yaitu kondisi di mana pasar cenderung memproduksi terlalu banyak satu jenis barang sementara menghasilkan terlalu sedikit barang lainnya.¹³

Keadaan tersebut mencerminkan rendahnya tingkat diversifikasi kegiatan produksi antar sektor yang mana diversifikasi tersebut sangat berguna untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja serta mendorong terciptanya peluang kerja baru.¹⁴ Adapun kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Jawa Tengah periode 2020—2025 adalah sebagai berikut:

¹³ Siti Rohima, *Ekonomi Publk*, (Palembang: Unsri Press, 2020), 23

¹⁴ M. Afdhal Chatra Perdana dan Adek Irma Rosi, *Buku Ajar Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Jambi: SonPedia Publishing, 2023), 58

Gambar 1. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Provinsi Jawa Tengah 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor industri pengolahan yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sekitar 34,44% pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 33,84% pada tahun 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati posisi kedua dengan kontribusi yang juga cukup besar, yaitu 14,3% pada tahun 2020 dan 13,03% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki peranan penting dalam struktur ekonomi daerah.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor turut menjadi penyumbang signifikan dengan kontribusi stabil di kisaran 13–14 persen. Sektor konstruksi juga memberikan andil yang cukup

besar, yaitu sekitar 10–11%, menggambarkan pentingnya aktivitas pembangunan dalam mendukung perekonomian provinsi. Di sisi lain, sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, pendidikan, serta akomodasi dan makan minum menempati porsi yang lebih kecil, namun tetap menjadi bagian integral dalam mendukung kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

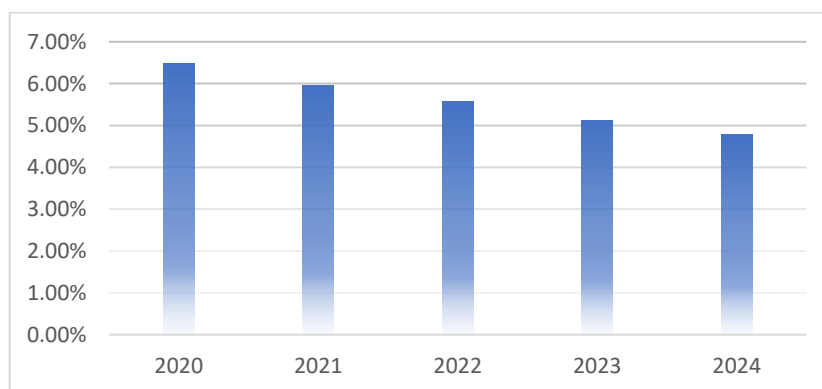
Berdasarkan data tersebut, perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan sebagai kontributor utama dalam pembentukan PDRB. Struktur ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah telah menunjukkan kecenderungan diversifikasi, yang tercermin dari meningkatnya peran sektor-sektor nonpertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Namun demikian, perubahan struktur ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kesejahteraan secara signifikan, yang terlihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 serta penurunannya yang relatif lambat pada periode berikutnya.

Variasi dalam ketiga faktor di atas mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi adalah indikator adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Todaro menjelaskan bahwa pengangguran memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, karena orang yang tidak memiliki pekerjaan

cenderung memiliki pendapatan rendah, kurang mendapatkan kesempatan untuk maju, serta mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan.¹⁵ Pergerakan angka Tingkat Pengangguran Terbuka dalam rentang 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 7 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan data di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT berada pada angka 6,48%, kemudian menurun menjadi 5,95% pada 2021 dan kembali turun menjadi 5,57% pada 2022. Penurunan tersebut berlanjut pada 2023 dengan TPT sebesar 5,13%, hingga mencapai level terendah pada 2024 sebesar 4,78%.

Berdasarkan paparan dari beberapa variabel di atas, perkembangan kemiskinan di Jawa Tengah selama 2020–2024 menunjukkan pola yang tidak sejalan dengan kinerja variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, dan

¹⁵ Rika Yuli Wulansari, *et. al.* “Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 6, no. 1 (Februari 2023): 82-95.

struktur sektor ekonomi. Meskipun nilai investasi mengalami peningkatan signifikan, terutama lonjakan PMA pada 2022, serta IPM terus meningkat dari 71,87 pada 2020 menjadi 73,88 pada 2024, penurunan tingkat kemiskinan berlangsung sangat lambat. Kondisi ini diperkuat oleh struktur ekonomi yang masih terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, sehingga tingkat diversifikasi ekonomi relatif rendah dan selaras dengan pandangan Stiglitz mengenai *product mix inefficiency* sebagai bentuk ketidaksempurnaan pasar.

Namun, ketidaksepadanan antara pergerakan variabel independen dan tingkat kemiskinan tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediasi. Meskipun TPT menurun konsisten dari 6,48% pada 2020 menjadi 4,78% pada 2024, penurunannya tidak berlangsung cukup cepat untuk menyeimbangkan dampak guncangan pandemi serta belum mampu mengimbangi peningkatan kapasitas produksi, kualitas hidup, dan perubahan struktur ekonomi.

Dengan kata lain, tambahan investasi, peningkatan IPM, dan aktivitas ekonomi dalam sektor-sektor dominan belum sepenuhnya terserap menjadi peluang kerja yang memadai bagi masyarakat. Akibatnya, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan cenderung bersifat tidak langsung dan termediasi oleh tingkat pengangguran yang masih menjadi persoalan struktural di Jawa Tengah.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh nilai investasi, indeks pembangunan manusia, dan diversifikasi ekonomi terhadap

kemiskinan dengan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dinamika penyebab kemiskinan di Jawa Tengah sehingga pemerintah daerah mampu merancang strategi pembangunan yang tidak hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

- a. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Provinsi Jawa Tengah terus-menerus menempati posisi sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, angka kemiskinan di atas 10 persen menjadi persoalan serius yang bukan hanya berdampak pada pembangunan daerah, namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap angka kemiskinan nasional.
- c. Meskipun indikator ekonomi dan sosial nilai investasi, indeks pembangunan manusia menunjukkan peningkatan yang positif setiap tahunnya, serta sektor ekonomi terdapat kecenderungan diversifikasi, tingkat kemiskinan tetap relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa peningkatan investasi, kualitas pembangunan

manusia, dan sektor ekonomi yang cenderung terdiversifikasi belum sepenuhnya mampu menekan kemiskinan akibat belum optimalnya penyerapan tenaga kerja.

2. Batasan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yaitu Nilai Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Diversifikasi Ekonomi.
- b. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan.
- c. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang memediasi hubungan antara variabel dependen dan independen.
- d. Fokus penelitian ini adalah pada hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
- e. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dalam rentang tahun 2020-2024.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah nilai investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
3. Apakah diversifikasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?

4. Apakah nilai investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
5. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
6. Apakah diversifikasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
7. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
8. Apakah nilai investasi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
9. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?
10. Apakah diversifikasi ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan nilai investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan diversifikasi ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan nilai investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan diversifikasi ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
7. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
8. Untuk mengetahui pengaruh nilai investasi terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
9. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024
10. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi ekonomi terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis atau akademis dalam bentuk tambahan informasi dan memperkaya

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh Nilai Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Diversifikasi Ekonomi terhadap Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Variabel Intervening.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pengambilan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemberian informasi terkait berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam bidang ilmu ekonomi syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang membahas topik serupa, guna memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan yang sama.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam penelitian ini digunakan empat variabel dengan rincian sebagai berikut:

1. Tiga variabel independen yang meliputi Nilai Investasi (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan Diversifikasi Ekonomi (X3).
2. Variabel dependen (Y) adalah Kemiskinan.
3. Variabel intervening (Z) adalah Tingkat Pengangguran Terbuka

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan (Y)

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dari segi makanan maupun non makanan, yang pengukurannya didasarkan pada garis kemiskinan.¹⁶

b. Nilai Investasi (X1)

Investasi merupakan aktivitas penanaman sejumlah dana di masa sekarang yang tujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan pada masa yang akan datang.¹⁷

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, "Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022" 30 Desember 2022, diakses Oktober 6, 2025, <https://oganilirkab.bps.go.id/id/publication/2022/12/30/3d6b2a723ae3e6eaa07acb7f/indikator-kemiskinan-kabupaten-ogan-ilir-tahun-2022.html>

¹⁷ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2020), 1

c. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) didefinisikan sebagai ukuran pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara yang dihitung berdasarkan gabungan indikator pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita.¹⁸

d. Diversifikasi Ekonomi (X3)

Diversifikasi ekonomi merupakan mengembangkan berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan diversifikasi ekonomi berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor tertentu serta mendorong terciptanya peluang kerja baru yang lebih beragam dan berkelanjutan.¹⁹

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dipergunakan dalam menunjukkan jumlah tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja serta mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia.²⁰

¹⁸ Mahri, *et. al.*, *Ekonomi Pembangunan Islam...*, 8

¹⁹ Perdana dan Rosi, *Buku Ajar Ekonomi...*, 58

²⁰ Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025” 20 Juni 2025, diakses Oktober 28, 2025, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=1112>

2. Definisi Operasional

a. Kemiskinan

Secara operasional, dalam penelitian ini variabel kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin dari setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).²¹

b. Investasi

Secara operasional, nilai investasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam hal ini, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan komponen utama pembentuk investasi.²²

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan rata-rata capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas serta harapan lama sekolah

²¹ BPS Kabupaten Ogan Ilir, “Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022”, 30 Desember 2022, diakses Oktober 6, 2025, <https://oganilirkab.bps.go.id/id/publication/2022/12/30/3d6b2a723ae3e6eaa07acb7f/indikator-kemiskinan-kabupaten-ogan-ilir-tahun-2022.html>

²² Ervita Luluk Zahara dan Emilia Octavia, *Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016–2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021), 1

bagi penduduk berusia 7 tahun. Adapun dimensi standar hidup layak diukur menggunakan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan.²³

d. Diversifikasi Ekonomi

Variabel diversifikasi ekonomi diukur berdasarkan tingkat konsentrasi sektor usaha dari setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap wilayah kabupaten/kota dengan mempergunakan *Normalized Herfindahl-Hirschman Index* (NHHI) untuk menilai konsentrasi. Indeks ini telah dipergunakan dalam penelitian oleh Guendouz dan Quassaf untuk mengukur tingkat diversifikasi ekonomi di Arab Saudi. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:²⁴

$$NHHI = \frac{\sqrt{\sum_i^N \left(\frac{x_i}{X}\right)^2} - \sqrt{\frac{1}{N}}}{1 - \frac{\sqrt{1}}{N}}$$

Keterangan:

x_i : nilai tambah (PDRB) sektor ke- i

X : keseluruhan nilai tambah (PDRB) pada suatu wilayah/negara

N : jumlah total sektor ekonomi

²³ Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2020, 30 April 2021, diakses Desember, 24 2025

<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>

²⁴ Abdelkrim A. Guendouz dan Saidi M. Quassaf, "Economic Diversification in Saudi Arabia under The Strategic Vision 2030" *Allied Business Academies* 24, no. 5 (Oktober 2020): 1-23.

$*x_i/X$: porsi nilai tambah sektor ke- i terhadap total nilai tambah seluruh sektor di negara tersebut.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Secara operasional, dalam penelitian ini tingkat pengangguran terbuka diukur melalui persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di antara penduduk usia kerja yang telah siap bekerja, akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa bagian, yaitu: a) Latar Belakang, b) Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian, c) Rumusan Masalah, d) Tujuan Penelitian, e) Kegunaan Penelitian, f) Ruang Lingkup, g) Penegasan Variabel, serta h) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian, meliputi pembahasan dari variabel pertama hingga variabel terakhir, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Lokasi Penelitian, c) Variabel dan Pengukuran, d) Populasi, Sampling, dan

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi, “Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mappi 2023” 28 November 2024, diakses November 4, 2025, <https://mappikab.bps.go.id/id/publication/2024/11/28/5a7e3b4cbc3ac235365b8399/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-mappi-2023.html>

Sampel Penelitian, e) Instrumen Penelitian, f) Teknik Pengumpulan Data, dan g) Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu: a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian, b) Paparan Data, c) Uji Asumsi Klasik, d) Uji Signifikansi, e) Analisis Jalur (Path Analysis), dan f) Uji Goodness of Fit.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Pembahasan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah dan menguraikan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini berisi dua bagian utama, yaitu: a) Kesimpulan, yang merupakan rangkuman hasil penelitian secara ringkas dan akurat serta menunjukkan keterkaitan antara hipotesis, rumusan masalah, dan tujuan penelitian; dan b) Saran, yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau kebijakan terkait.